

**PROFESOR DAN DOKTOR BAGI POLITISI: SEBUAH TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG GELAR AKADEMIK DALAM PERSPEKTIF RELASI KAPITAL PIERRE BOURDIEU**

*PROFESSORS AND DOCTORS FOR POLITICIANS: A PHILOSOPHICAL REVIEW OF ACADEMIC DEGREES FROM THE PERSPECTIVE OF PIERRE BOURDIEU'S CAPITAL RELATIONS*

**Surya Desismansyah Eka Putra\***

Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 12 Januari 2023  
Disetujui : 03 Februari 2025

**Keywords:**

academic degree; politician; capital; Pierre Bourdieu's theory

**Kata Kunci:**

gelar akademik; politisi; kapital; teori Pierre Bourdieu

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [surya.putra.fis@um.ac.id](mailto:surya.putra.fis@um.ac.id)

**Abstract:** this study aims to analyze the essence of professor and doctoral degrees in academia and the relationship of academic degrees as a capital commodity favored by politicians from Pierre Bourdieu's perspective. The method in this study is a literature study carried out systematically through the stages of topic identification, collection of relevant literature, critical analysis of content, and compilation of results in a narrative framework. Data were collected from various sources such as journal articles, books, and relevant academic documents. Data analysis was carried out by deeply examining the arguments in the literature. The results of the study show that doctoral and professorial degrees are ethical achievements awarded by higher education institutions to individuals after meeting academic and pedagogical standards. Academic degrees have now become economic commodities for politicians to perpetuate domination. Academic degrees based on Pierre Bourdieu's perspective can be understood as a form of symbolic capital that is often used to strengthen positions in social and political structures. The commodification of degrees not only reduces the intrinsic value of academic degrees, but also reduces public trust in the higher education system.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis esensi gelar profesor dan doktor dalam dunia akademis serta relasi gelar akademis sebagai komoditas kapital berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi topik, pengumpulan literatur relevan, analisis kritis terhadap konten, serta penyusunan hasil dalam kerangka naratif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen akademik yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam berbagai argumen dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa gelar doktor dan profesor merupakan pencapaian etis yang diberikan oleh institusi pendidikan tinggi kepada individu setelah memenuhi standar akademik serta pedagogis. Gelar akademis kini berubah menjadi komoditas ekonomis para politisi untuk melanggengkan dominasi. Gelar akademik berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu dapat dipahami sebagai bentuk kapital simbolik yang kerap dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dalam struktur sosial dan politik. Komodifikasi gelar tidak hanya menurunkan nilai intrinsik dari gelar akademik, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi.

**PENDAHULUAN**

Gelar akademik merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan tinggi.

Pengakuan formal atas prestasi pendidikan seseorang setelah menyelesaikan program studi tertentu diberikan dalam bentuk gelar

akademik. Kepemilikan gelar akademik tidak hanya mencerminkan penguasaan ilmu dalam bidang tertentu, tetapi juga menjadi indikator kompetensi dan keahlian individu di masyarakat. Gelar akademik di Indonesia dibagi dalam beberapa jenjang meliputi vokasi atau diploma, sarjana, magister, dan doktor (Hanggoro, 2020). Gelar akademik dalam dunia pendidikan tinggi dapat diperoleh seseorang setelah menyelesaikan persyaratan yang menjadi kewajiban akademisnya (Ichsan, Marzuki, & Purba, 2022). Perolehan gelar akademik sejatinya sakral secara moral karena melalui proses pedagogi di sebuah universitas.

Dampak dari pemberian gelar akademis sangat luas dan tidak hanya terbatas pada individu, tetapi mencakup masyarakat secara keseluruhan. Institusi pendidikan tinggi yang memberikan gelar akademik dengan mengedepankan etika dan kualitas penelitian dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan lebih baik serta relevan bagi kebutuhan masyarakat. Pemegang gelar diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi komunitas melalui penelitian yang aplikatif dan pengabdian masyarakat (Lailiyah dkk., 2023). Institusi pendidikan harus menerapkan standar yang ketat dalam proses pemberian gelar akademik serta memastikan bahwa setiap individu penerima telah memenuhi kriteria dan moralitas sesuai ketentuan. Gelar akademik tetap menjadi simbol *prestise* yang dihormati dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan pendidikan tinggi tidak terlepas dari dinamika pengakuan terhadap capaian akademik seseorang. Pemberian gelar akademis khususnya *doktor honoris causa* selanjutnya disingkat Dr. (H.C.) secara umum dapat diperkenankan dengan catatan harus memberi kontribusi membangun kredibilitas sistem pendidikan tinggi yang berpengaruh positif terhadap dinamika sosial di masyarakat. Gelar akademik baik Profesor dan Dr. (H.C.) telah mengalami transformasi signifikan dalam konteks pendidikan tinggi dan masyarakat (Effendi, 2016). Gelar Profesor dan Dr. (H.C.) pada masa sebelumnya dianggap sebagai pengakuan etis yang diberikan kepada individu setelah memenuhi standar akademik serta kontribusi ilmiah secara substansial (Hanggoro, 2020). Gelar akademik Profesor dan Dr. (H.C.) kini

telah bergeser menjadi komoditas yang sering dimanfaatkan oleh politisi untuk memperkuat posisinya dalam arena kekuasaan. Fenomena pergeseran esensi gelar akademik menimbulkan berbagai kontroversi terkait fungsi maupun dampaknya terhadap dunia akademis serta struktur sosial.

Integritas akademik dan pemberian gelar doktor mencuat melalui kasus yang belakangan menjadi sorotan publik. Kasus penganugerahan gelar Dr. (H.C.) Raffi Ahmad dan gelar doktor “patas” yang disandang Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menimbulkan kontroversi, karena menyoroti persoalan lebih luas terkait etika serta kredibilitas institusi pendidikan tinggi di Indonesia (Nur, 2024; Dongoran, 2024; Yaniasih, 2024). Gelar akademik dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu dianalisis sebagai bentuk kapital budaya yang memiliki nilai dan kekuatan dalam konteks sosial (Webb et al., 2017). Pierre Bourdieu mengemukakan bahwa kapital budaya dalam konteks gelar akademik tidak hanya bertujuan sebagai pengakuan formal, tetapi juga alat mempertahankan dominasi sosial (Reed & Johnson, 2023). Gelar profesor dan doktor yang seharusnya mencerminkan keahlian dan integritas akademis, sering dipandang sebagai alat legitimasi bagi politisi untuk memperkuat posisinya serta mempengaruhi opini publik.

Pergeseran makna gelar akademik Profesor dan Dr. (H.C.) menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan serta sumber daya di kalangan masyarakat terutama bagi akademisi sejati. Gelar akademik telah bertransformasi dari simbol *prestise* moral dan keahlian akademis menjadi komoditas ekonomis yang diumpangkan kepada politisi sebagai transaksi kepentingan oleh lembaga pendidikan tinggi. Dinamika pergeseran gelar akademik menunjukkan hubungan kompleks antara pendidikan tinggi, kekuasaan politik, dan struktur sosial di masyarakat kontemporer. Kebijakan pemberian gelar akademik harus diperketat untuk mempertahankan kepercayaan publik serta kredibilitas sistem pendidikan secara keseluruhan (Afiyanto dkk., 2021). Upaya mempertahankan integritas gelar akademik sangat penting untuk memperkuat peran pendidikan tinggi dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis terkait (1)

esensi gelar profesor dan doktor dalam dunia akademis serta (2) relasi antara gelar akademis dan kapital dalam perspektif Pierre Bourdieu.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang berfokus pada analisis literatur mengenai esensi gelar profesor dan doktor, serta relasinya dengan kekuasaan politik berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen akademik yang relevan dengan kapital simbolik, etika pendidikan, serta dinamika pemberian gelar akademik di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji argumen dalam literatur (Abdussamad, 2021). Kajian ini secara khusus menyoroti poin-poin utama pemikiran Pierre Bourdieu dalam bukunya yang berjudul *Form of Capital* sebagai pisau analisis terkait transformasi gelar akademik menjadi komoditas politik. Kajian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan kedalaman dan keakuratan analisis (Knapić et al., 2024; Wang, 2016). Langkah-langkah dalam kajian ini meliputi identifikasi topik, pengumpulan literatur yang relevan, analisis kritis terhadap konten, serta penyusunan hasil dalam kerangka naratif mengaitkan praktik pemberian gelar akademik dengan konteks sosial dan politik. Hasil akhir dari kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi filosofis dan praktis dalam mendorong pemberian gelar akademik yang lebih etis dan transparan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Esensi Gelar Profesor dan Doktor dalam Dunia Akademis

Gelar akademik profesor dan doktor seharusnya mencerminkan pencapaian intelektual dan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Gelar akademik merujuk pada pengakuan kepada individu setelah memenuhi standar akademik dan etika yang tinggi dalam penelitian serta pengajaran. Gelar akademik bukan hanya sekadar simbol *prestise*, tetapi tanggung jawab moral bagi pemegangnya untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat (Ion, Lupu, & Nicolae, 2022; Reed & Johnson, 2023). Pemberian gelar akademik harus mengikuti standar ketat untuk memastikan individu penerima telah memenuhi kriteria akademik sesuai ketentuan

(Effendi, 2016). Pemberian gelar akademik harus berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan mencakup integritas, inovasi, serta dampak sosial dari karya ilmiahnya.

Proses pemberian gelar akademik tidak hanya meliputi aspek formalitas, tetapi juga penilaian kritis terhadap kualitas penelitian dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Institusi pendidikan tinggi dalam proses pemberian gelar akademik melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kualifikasi pendidikan, publikasi ilmiah, serta kontribusi terhadap komunitas akademis (Zhafira dkk., 2024; Mudzakkir dkk., 2021). Contoh konkret dapat ditemukan pada pemberian gelar Dr. (H.C.) kepada Sukarno, Presiden pertama Republik Indonesia oleh Universitas Gadjah Mada (Darmawan, Mulyana, & Fauzi, 2023; Kurniawan & Mahardi, 2024). Pemberian gelar akademik kepada Sukarno telah melalui prosedur yang jelas dan terukur karena kontribusinya dalam membangun negara serta institusi pendidikan. Gelar akademis menjadi indikator penting atas kredibilitas seorang politisi di dunia akademik dan profesional yang harus mempertimbangkan penilaian moral.

Tantangan dalam pemberian gelar akademis semakin meningkat seiring dengan munculnya praktik-praktik yang tidak etis dalam dunia pendidikan. Kasus dalam dunia pendidikan seperti plagiasi, penyalahgunaan kekuasaan dalam proses seleksi, dan pemberian gelar kehormatan tanpa dasar yang jelas menunjukkan adanya krisis integritas di beberapa institusi (Disantara, 2020). Tokoh politik sering menerima gelar akademis pemberian dari berbagai universitas baik negeri atau swasta dalam jumlah tidak sedikit, seperti 15 gelar Dr. (H.C.) yang dimiliki oleh Megawati Soekarnoputri (Imaduddin, 2022). Pemberian gelar akademik secara berlebihan kepada politisi tidak hanya merugikan reputasi institusi pendidikan tinggi, tetapi juga menurunkan nilai dari gelar itu sendiri. Institusi pendidikan tinggi penting menerapkan kebijakan yang ketat dan transparan dalam proses pemberian gelar untuk menjaga integritas akademik dan mempertahankan kepercayaan publik.

Pemberian gelar akademik tidak seharusnya menjadi ajang transaksi kepentingan terselubung atau *undertable transaction* dengan alasan akademis untuk memenuhi kebutuhan politis, seperti kasus kontroversi gelar Dr. (H.C.) Raffi

Ahmad dan gelar doktor secara “patas” kepada Bahlil Lahadalia. Kontroversi pemberian gelar Dr. (H.C.) kepada Raffi Ahmad oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand telah menimbulkan problematika sistemik di kalangan masyarakat dan akademisi (Pratama & Anggraini, 2024). Gelar Dr. (H.C.) yang dianugerahkan kepada Raffi Ahmad justru menjadi sorotan publik yang meragukan kredibilitas UIPM sebagai institusi pendidikan (CNN Indonesia, 2024). Pemberian gelar kehormatan kepada Raffi Ahmad dinilai tidak didasarkan pada landasan akademik yang kuat, mengingat UIPM tidak terakreditasi dan tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Pemberian gelar kehormatan kepada Raffi Ahmad menunjukkan adanya potensi krisis integritas dalam sistem pendidikan tinggi, karena pemerolehannya melalui jalur yang tidak sesuai standar moralitas akademik.

Kritik terhadap pemberian gelar Dr. (H.C.) kepada Raffi Ahmad semakin mengemuka setelah terungkap bahwa proses pendaftarannya dapat dilakukan melalui *google form*. Mekanisme pemberian gelar Dr. (H.C.) melalui pendaftaran secara *online* tanpa ada seleksi ketat dianggap merendahkan makna dari gelar kehormatan yang seharusnya diberikan kepada individu atas kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kemanusiaan (Raihan, Yakub, & Kambo, 2023). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia juga menegaskan bahwa gelar Dr. (H.C.) yang dianugerahkan kepada Raffi Ahmad tidak diakui secara hukum serta menambah keraguan masyarakat terhadap integritas UIPM (Putri, 2024; Setuningsih, 2024). Raffi Ahmad sebagai seorang publik figur, dinilai tidak memenuhi kriteria akademik dan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, sehingga banyak pihak mempertanyakan legitimasi gelar yang diterimanya.

Kasus gelar doktor “patas” yang diraih oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM dari Universitas Indonesia, juga menarik perhatian karena hanya ditempuh selama satu tahun delapan bulan. Bahlil Lahadalia telah menyelesaikan program doktoralnya dengan predikat *cumlaude* dan mengangkat disertasi mengenai kebijakan hilirisasi nikel, tetapi durasi studi yang sangat singkat memicu kontroversi keabsahan proses akademiknya (Hantoro, 2024; Nur, 2024).

Publik meragukan adanya perlakuan istimewa yang diterima Bahlil Lahadalia dalam proses pendidikan, terutama mengingat durasi normal penyelesaian program doktor di Universitas Indonesia umumnya berkisar antara lima hingga enam semester. Kritikan terhadap durasi studi Bahlil Lahadalia mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam menjaga standar akademik. Alumni Universitas Indonesia menyuarakan keprihatinan terhadap ketidakadilan oleh mahasiswa lain yang harus berjuang lebih keras untuk menyelesaikan studinya (Prastiwi, 2024). Ketidakpuasan di kalangan akademisi mengenai perlakuan berbeda dalam pemberian gelar akademik dapat merusak reputasi institusi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi.

Kontroversi pemberian gelar kepada Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia menggambarkan dampak sosial terkait kredibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Pemberian gelar tanpa memperhatikan moral dan standar akademik dapat mengakibatkan kesakralan intelektual pada gelar yang diperoleh. Persepsi negatif masyarakat yang beranggapan bahwa untuk meraih gelar doktor tidak diperlukan perjuangan intelektual, tetapi cukup membawa “bingkisan dalam kotak”. Gelar akademik tidak lagi dipandang sebagai simbol *prestise* dan kompetensi, melainkan sebagai komoditas ekonomi dan alat transaksi politik. Gelar menjadi instrumen penambah nilai ekonomi bagi aktor-aktor kampus yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, tetapi mengabaikan esensi sejatinya yaitu kecakapan dan kepatutan (Webb et al., 2017). Gelar akademik jika berubah menjadi komoditas politik yang hanya menguntungkan segelintir individu khususnya para politisi dan pesohor, maka institusi pemberi telah kehilangan jati dirinya sebagai lembaga bermoral dan berubah menjadi bagian dari praktik pasar gelap gelar.

Kontroversi terkait gelar Dr. (H.C) Raffi Ahmad dan gelar doktor “patas” yang diraih Bahlil Lahadalia menjadi tanda bahaya bagi universitas untuk menjaga integritas dalam sistem pendidikan tinggi. Rakusnya politisi terhadap gelar akademik tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Spanyol pada Tahun 2018 terkait skandal pemberian gelar master dari Universitas Raja Juan Carlos kepada Cristina Cifuentes selaku Perdana Menteri Regional Madrid. Investigasi mengungkap bahwa Cristina Cifuentes

tidak memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar magister (Núñez, Dominguez, & Alvarez, 2018). Skandal Cristina Cifuentes menjadi dasar evaluasi moral dan pedagogis oleh Kementerian Pendidikan Spanyol dan sebagai pelajaran bagi Indonesia untuk mengevaluasi praktik pemberian gelar akademik. Pemberian gelar harus didasarkan pada kriteria jelas dan transparan untuk memastikan penerima memenuhi standar akademik serta lulus dalam penelusuran etis yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Relasi Antara Gelar Akademis dan Kapital dalam Perspektif Pierre Bourdieu**

Pierre Bourdieu seorang sosiolog dan antropolog asal Perancis, dikenal melalui pemikirannya yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya di wilayah pedesaan serta pengalamannya selama melakukan penelitian etnografi di Aljazair. Pierre Bourdieu mengembangkan konsep kunci seperti habitus, kapital, dan arena untuk menjelaskan dinamika sosial serta kekuasaan di masyarakat (Atkinson, 2021). Kontribusi utama Pierre Bourdieu salah satunya yaitu teori habitus yang merujuk pada sistem disposisi terbentuk melalui pengalaman individu dan lingkungan sosial (Wiegmann, 2017). Habitus mendorong pemahaman lebih mendalam terkait cara berinteraksi dengan struktur sosial dan tindakannya dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial (Grillo, 2018). Konsep habitus dikaitkan dengan empat jenis kapital meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik yang saling berinteraksi untuk membentuk posisi individu dalam hierarki sosial.

Pierre Bourdieu pada saat yang bersamaan juga memperkenalkan konsep arena atau *field* sebagai ruang individu dan kelompok bersaing mendapatkan modal tertentu. Setiap arena memiliki aturan dan struktur kekuasaan yang berbeda, serta mempengaruhi cara individu beroperasi di dalamnya. Teori arena dari Pierre Bourdieu membantu menjelaskan ketidaksetaraan sosial serta cara dominasi dipertahankan melalui mekanisme struktural. Pierre Bourdieu mengembangkan konsep kapital sebagai alat analisis untuk memahami dinamika sosial dan kekuasaan dalam masyarakat. Bentuk kapital yang saling terhubung menurut Pierre Bourdieu, yaitu kapital ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik (Bourdieu, 2002). Kapital ekonomi merujuk pada sumber daya finansial dan aset yang dimiliki individu atau kelompok untuk

memperoleh kekuasaan serta status dalam masyarakat. Kapital ekonomi sangat mudah untuk dikonversikan menjadi bentuk kapital lainnya, sehingga memiliki peran penting dalam menentukan posisi sosial seseorang.

Kapital budaya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan selera dapat diperoleh individu melalui sosialisasi serta pendidikan formal. Pierre Bourdieu beranggapan bahwa kapital budaya berfungsi untuk meningkatkan martabat sosial individu dan mempengaruhi kemampuannya dalam berinteraksi di masyarakat (Jaeger & Breen, 2016). Individu dengan kapital budaya tinggi cenderung lebih memiliki akses besar terhadap sumber daya pendidikan dan peluang karir. Kapital budaya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi ketidaksetaraan dalam masyarakat (Delva, Forrier, & Cuyper, 2021). Teori arena dari Pierre Bourdieu membantu menjelaskan ketidaksetaraan sosial dan cara dominasi dapat dipertahankan melalui mekanisme struktural yang ada.

Kapital sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial yang dapat memberikan akses bermanfaat kepada sumber daya. Pierre Bourdieu menekankan bahwa kekuatan kapital sosial bergantung pada seberapa besar individu dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau budaya (Mikiewicz, 2021; O'Brien & Fathaigh, 2005). Kapital sosial sebagai penghubung untuk mengakses modal lainnya, sehingga semakin luas jaringan sosial seseorang, maka semakin besar peluangnya memperoleh sumber daya yang dapat meningkatkan posisi sosial. Kapital simbolik muncul dari pengakuan dan legitimasi masyarakat terhadap individu berdasarkan kepemilikan modal lainnya, meliputi *prestise*, reputasi, atau penghargaan (Wacquant, 2013). Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik memberikan dampak signifikan dalam mempengaruhi identitas sosial dan persepsi orang lain terhadap individu.

Keempat bentuk kapital menurut Pierre Bourdieu saling berkaitan dan berperan dalam membentuk struktur sosial serta dinamika kekuasaan di masyarakat. Pemikiran Pierre Bourdieu tentang kekuasaan simbolik menjadi salah satu aspek penting dalam analisis sosialnya. Pierre Bourdieu beranggapan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat ekonomi atau politik, tetapi

juga terbentuk melalui simbol dan praktik budaya (Malone, 2020; Peters, 2012). Bahasa menurut Pierre Bourdieu tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sarana untuk mengukuhkan status sosial dan identitas individu. Pemikiran Bourdieu menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas hubungan antara individu, struktur sosial, dan praktik budaya dalam masyarakat modern. Kontribusi intelektual Pierre Bourdieu dalam bidang sosiologi dan antropologi, khususnya tentang pendidikan, identitas sosial, dan kekuasaan politik menjadi landasan penting untuk menganalisis fenomena pemberian gelar akademik sebagai bagian dari dinamika sosial di kalangan masyarakat.

Pemberian gelar akademik yang kontroversial kepada Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia mencerminkan pergeseran makna gelar akademik menjadi komoditas ekonomi serta politik. Teori kapital Pierre Bourdieu membantu menganalisis hubungan antara gelar akademik, kekuasaan politik, dan struktur sosial melalui kepemilikan berbagai modal atau kapital seseorang baik ekonomi, budaya, sosial, serta simbolik yang saling berpengaruh menentukan posisi individu dalam arena kepentingan. Gelar akademik pada perspektif Pierre Bourdieu dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang memiliki nilai dalam struktur masyarakat, yaitu bagian dari kepemilikan modal budaya (Raihan, Yakub, & Kambo, 2023). Gelar akademis tidak hanya memberikan pengakuan kepada individu, tetapi juga berfungsi sebagai alat legitimasi dalam interaksi sosial dan profesional (Efendi & Yossyafaat, 2024). Pemegang gelar akademik sering kali mendapatkan akses lebih besar ke sumber daya, jaringan profesional, dan peluang karir. Pemberian gelar akademik yang tidak didasarkan pada etika dan integritas, maka dapat menghilangkan nilainya sebagai modal budaya serta berpotensi menciptakan ketidakadilan di masyarakat.

Langkah awal untuk menganalisis motif Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia dalam memperoleh gelar akademik sebagai modal kultural yaitu dengan mengidentifikasi jenis kapital yang dimilikinya berdasarkan kerangka teori Pierre Bourdieu. Raffi Ahmad memiliki kapital ekonomi sangat besar dengan kekayaan mencapai Rp 2,9 triliun yang menjadikannya bagian dari 1% penduduk terkaya di Indonesia (Putri, 2024;

Asih, 2024; Hidayat, 2025). Kapital simbolik dan sosial Raffi Ahmad sangat kuat sebagai figur publik terkenal baik presenter, *youtuber*, aktor, pengusaha di berbagai bidang, serta tim sukses salah satu calon presiden Pemilu 2024 yang berkontribusi pada pengangkatannya menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni (Basyari, 2024; Arbar, 2023; Rahmayunita, 2024; Setuningsih, 2023). Bahlil Lahadalia memiliki kapital ekonomi dengan kekayaan sekitar Rp 310 miliar (Puspita, 2024). Kapital sosial Bahlil Lahadalia diperkuat melalui perannya sebagai anggota aktif Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015 hingga 2019 (Junida, 2021). Legitimasi sosial Bahlil Lahadalia secara simbolik diperkuat oleh posisinya sebagai Menteri ESDM.

Data kekayaan, jabatan, dan keterlibatan sosial menunjukkan bahwa Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia memiliki modalitas serta simbolik yang kuat. Posisi strategis politisi memberikan kapasitas yang cukup untuk memengaruhi serta mengendalikan pihak lain. Berdasarkan teori Pierre Bourdieu, pemetaan modal Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia menunjukkan bahwa kapital yang belum dikuasai sepenuhnya yaitu kapital kultural berupa gelar akademik. Kepemilikan gelar akademik menunjukkan kapasitas pedagogis dan intelektual seseorang dalam bidang tertentu, meskipun kebijakan yang diambil bertentangan dengan kepentingan sosial. Gelar Dr. (H.C) dalam bidang *Event Management and Global Digital Development* yang dianugerahkan kepada Raffi Ahmad berpotensi memperkuat legitimasi dirinya jika terlibat dalam sebuah proyek terkait atau justru bermasalah, karena dianggap memiliki kapasitas untuk menanganinya (Hasan, 2024). Jabatan Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia mencerminkan kapital simbolik menurut kerangka teori Pierre Bourdieu yang mencakup reputasi dan pengakuan sosial, sehingga dapat memudahkannya mendapatkan modal lainnya termasuk gelar akademik.

Kepemilikan gelar akademik sering diupayakan sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi kekuasaan seseorang. Gelar akademik tidak lagi berstatus sebagai predikat akademis, melainkan objek transaksional (Mansur, Sofianto, & Mahzuni, 2013; Sulhan & Lessy, 2022). Gelar tidak terbatas pada aspek akademik, tetapi juga

mencakup gelar sosial yang mencerminkan kecakapan intelektual seseorang (Reed & Johnson, 2023). Pemberian gelar doktor kepada Bahlil Lahadalia menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan terkait keabsahan proses pendidikan serta kualitas disertasi yang dihasilkan. Kasus gelar doktor “patas” Bahlil Lahadalia menjadi sorotan publik yang beranggapan bahwa kualitas integritas akademik perguruan tinggi dicurigai sebagai lokasi pasar gelap praktik komersialisasi gelar (Dongoran, 2024; Nur, 2024). Kampus telah berubah menjadi pasar gelap gelar dan penyedia jasa cetak ijazah yang terlepas dari nilai moral, serta menjadi alat pendukung dominasi politisi dalam arena kekuasaan (Pisani & Micheletti, 2020). Pemberian gelar doktor kepada Bahlil Lahadalia dalam konteks teori Bourdieu menunjukkan bahwa kapital sosial yang diperoleh melalui jaringan politik dan hubungan kekuasaan dapat memengaruhi akses individu terhadap modal akademik.

Praktik pemberian gelar akademik secara tidak transparan dan tidak memenuhi standar etika telah merusak nilai intrinsik dari gelar yang diberikan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengekspresikan kekhawatirannya melalui sebuah spanduk bertuliskan gelar akademik seharusnya menjadi simbol integritas dan perjuangan panjang, bukan komoditas yang dapat dibeli secara instan (Lavenia Y, 2024). Pendidikan tinggi jika kehilangan makna sebagai ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan integritas akademik, maka modal simbolik dari institusi pendidikan akan terdevaluasi (Putra, 2022). Komodifikasi gelar akademik dapat berdampak negatif pada persepsi publik terhadap pendidikan tinggi secara keseluruhan. Kepercayaan terhadap kualitas pendidikan dan lulusan perguruan tinggi berpotensi menurun jika masyarakat menilai gelar akademik dapat diperoleh secara instan (Rosser, 2023). Ketidakpuasan terhadap pemberian gelar akademik secara tidak transparan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi modal sosial dan budaya di masyarakat, karena individu yang memiliki akses politik atau finansial lebih mudah mendapatkan pengakuan

Institusi pendidikan sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pemberian gelar akademik agar tetap menjaga kredibilitas dan integritasnya. Proses akreditasi

yang transparan serta evaluasi secara objektif terhadap kualifikasi individu harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pemberian gelar mencerminkan pencapaian nyata dalam bidang ilmu pengetahuan (Afiyanto dkk., 2021). Institusi pendidikan tinggi harus berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Analisis kasus Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia secara keseluruhan menunjukkan bahwa gelar akademik dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dalam arena kekuasaan politik. Teori kapital Bourdieu menunjukkan bahwa berbagai bentuk kapital berinteraksi untuk membentuk posisi individu dalam struktur sosial dengan kecenderungan digunakan sebagai alat mendominasi, terutama pada gelar akademik yang seharusnya menjadi simbol *prestise* serta kehormatan.

Integritas sistem pendidikan tinggi harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh praktik komersialisasi yang merugikan. Tantangan integritas akademik harus dihadapi dengan melakukan dialog antara pemerintah, institusi pendidikan tinggi, dan masyarakat untuk bersinergi membangun budaya pendidikan yang bermoral, bertanggung jawab, transparansi, serta profesionalitas dalam pemberian gelar. Pendidikan tinggi sebagai pilar utama pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Webb et al., 2017). Pendidikan berdasarkan pandangan Tan Malaka bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan. Kesadaran pentingnya mempertahankan moralitas dan menolak budaya “membeli gelar” dalam pendidikan tinggi harus terus ditumbuhkan di masyarakat. Gelar akademik bukan sekadar simbol status sosial, tetapi tanggung jawab moral bagi pemegangnya untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Gelar doktor dan profesor merupakan pencapaian etis yang diberikan oleh institusi pendidikan tinggi kepada individu setelah memenuhi standar akademik serta pedagogis. Gelar doktor dan profesor mencerminkan pencapaian akademik yang signifikan dan kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan. Gelar akademik berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu dapat dipahami sebagai bentuk kapital simbolik yang

kerap dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dalam struktur sosial dan politik. Fenomena komodifikasi gelar seperti dalam kasus Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia menunjukkan pergeseran makna gelar akademik menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan hasil dari proses intelektual yang bermutu. Komodifikasi gelar tidak hanya menurunkan nilai intrinsik dari gelar akademik, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi. Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat harus bersinergi menjaga integritas sistem pendidikan dengan menerapkan kebijakan yang transparan serta adil dalam pemberian gelar akademik. Etika dan kualitas harus dijunjung tinggi dalam proses pemberian gelar agar pendidikan tinggi tetap menjadi pilar utama pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afiyanto, M., Aisyah, R. H. S., Nugraha, X., Mashuri, M., & Firmansyah, R. (2021). Analisis Pengujian Keputusan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/Pk/Tun/2013. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1728-1745.
- Arbar, T. F. (22 Desember 2023). Raffi Ahmad Hadiri Debat Cawapres, Dukung Prabowo? *CNBC Indonesia*, hlm 1.
- Asih, R. W. (24 Oktober 2024). Belum Laporan LHKPN, Segini Kisaran Harta Kekayaan Raffi Ahmad. *Bisnis.com*, hlm. 1-2.
- Atkinson, W. (2021). Fields and Individuals: from Bourdieu to Lahire and Back Again. *European Journal of Social Theory*, 24(2), 195-210.
- Basyari, I. (16 Oktober 2024). Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Kian Semaraknya Pesohor di Panggung Politik. *Kompas*, hlm. 1.
- Bourdieu, P. (2002). Forms of Capital. *Economic Sociology*, 3(1), 60-74.
- Darmawan, W., Mulyana, A., & Fauzi, W. I. (2023). Renaissance Pedagogy, Dedication of Life, and the School of Life: Soekarno's Thoughts on Education. *Paramita*, 33(2), 329-340.
- Delva, J., Forrier, A., & Cuyper, N. D. (2021). Integrating Agency and Structure in Employability: Bourdieu's Theory of Practice. *Journal of Vocational Behavior*, 127(1), 103579.
- Disantara, F. P. (2020). Plagiarism in Higher Education: Power Relations and Legal Aspects. *Rechtsidee*, 7(2), 1-15.
- Dongoran, H. A. (17 November 2024). UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia. *Tempo*, hlm 2.
- Efendi, V. D., & Yossyafaat, H. (2024). Upaya Hukum Tata Usaha Negara terhadap Polemik Penganugerahan Gelar Kehormatan Akademis. *Media Iuris*, 7(2), 371-400.
- Effendi, U. I. (2016). Sekilas tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC)/ Gelar Kehormatan di Universitas Gadjah Mada. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 9(3), 52-64.
- Grillo, C. M. (2018). Revisiting Fromm and Bourdieu: Contributions to Habitus and Realism. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 48(4), 416-432.
- Hanggoro, H. T. (6 Agustus 2020). Sejarah Pengangkatan Guru Besar dan Profesor di Indonesia. *Historia*, hlm. 1.
- Hanggoro, H. T. (20 Agustus 2020). Mengulik Gelar-gelar Akademik di Indonesia. *Historia*. *Historia*, hlm. 2.
- Hantoro, J. (15 November 2024). Cerita di Balik Penangguhan Kelulusan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia. *Tempo*, hlm 2.
- Hasan, I. (28 September 2024). 7 Potret Raffi Ahmad Dapat Gelar Doktor HC di Thailand, Berjasa di Dunia Hiburan. *Liputan.com*, hlm. 1-2.
- Hidayat, D. (2025). Laporan LHKPN, Kira-kira Segini Kekayaan Raffi Ahmad. <https://www.rri.co.id/Anti-Korupsi/1244823/Lapor-Lhkpn-Kira-Kira-Segini-Kekayaan-Raffi-Ahmad>.
- Ichsan, R. N., Marzuki, & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid. Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 285-300.
- Imaduddin, A. H. (10 Agustus 2022). Megawati

- Punya 15 Gelar Doktor Honoris Causa, Siapa Lagi Politisi Punya Predikat HC? *Tempo*, hlm. 1.
- Ion, I. E., Lupu, R., & Nicolae, E. (2022). Academic Achievement and Professional Aspirations: Between the Impacts of Family, Self-Efficacy and School Counselling. *Journal of Family Studies*, 28(2), 587-610.
- Jaeger, M. M., & Breen, R. (2016). A Dynamic Model of Cultural Reproduction. *American Journal of Sociology*, 121(4), 1079-1115.
- Junida, A. I. (25 Maret 2021). Bahlil Lahadalia Ajak Kader HMI Jadi Pengusaha. *Antaraneews.com*, hlm. 1.
- Knapić, V., Licul, G., & Jelenc, L. (2024). A Literature Review of Lean Methods and Tools: Research Trends and Issues. *International Journal of Productivity and Quality Management*, 43(3), 320-349.
- Kurniawan, D. A., & Mahardi, N. A. O. (2024). Jejak Gelar Doctor *Honoris Causa* Soekarno dan Pembelajaran Sejarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 8(1), 145-159.
- Lailiyah, S., Syam, R. S. E., Saefullah, M., Qorny, A. E., & Alawiyah, L. (2023). Gelar Profesor Kehormatan: Kutub Capaian Prestasi dan Marwah Akademik. *Journal on Education*, 4(05), 15967-15976.
- Lavenia, Y. A. (6 November 2024). Kata BEM UI Soal Spanduk Jasa Kilat Gelar Akademik Bergambar Bahlil. *Tempo*, hlm. 1.
- Malone, P. (2020). Bourdieu in London. *The Journal of Architecture*, 25(6), 679-696.
- Mansur, M., Sofianto, K., & Mahzuni, D. (2013). Otoritas dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional di Loloda Maluku Utara (1808-1958). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(1), 64-72.
- Mikiewicz, P. (2021). Social Capital and Education: An Attempt to Synthesize Conceptualization Arising from Various Theoretical Origins. *Cogent Education*, 8(1), 1907956.
- Mudzakkir, M., Bustami, M. R., Ikomatussuniah, I., & Maler, W. (2021). The Policy of *Honoris Causa* Doctorate in Indonesian Higher Education 2000-2020. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), 248-267.
- Núñez, J., Domínguez, Í., & Álvarez, P. (10 April 2018). Master's Degree Scandal Deepens, As Another PP Politician Admits Not Going to Class. *El Pais*, hlm. 1.
- Nur, M. F. (9 Oktober 2024). Kontroversi Gelar HC Raffi Ahmad & Buramnya Integritas Kampus. *Tirto.id*, hlm. 1.
- Nur, M. F. (18 Oktober 2024). Doktor Instan ala Bahlil Tuai Kritik & Diragukan Kualitasnya. *Tirto.id*, hlm. 1.
- O'Brien, S., & Fathaigh, M. Ó. (2005). Bringing in Bourdieu's Theory of Social Capital: Renewing Learning Partnership Approaches to Social Inclusion. *Irish Educational Studies*, 24(1), 65-76.
- Peters, G. (2012). The Social as Heaven and Hell: Pierre Bourdieu's Philosophical Anthropology. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 42(1), 63-86.
- Pisani, E., & Micheletti, S. (2020). Social Capital and Rural Development Research in Chile. A Qualitative Review and Quantitative Analysis Based on Academic Articles. *Journal of Rural Studies*, 80(1), 101-122.
- Prastiwi, M. (14 November 2024). Kronologi Polemik Gelar Doktor Bahlil hingga Kini Ditangguhkan UI. *Kompas*, hlm. 1.
- Pratama, F. N., & Anggraini, P. (9 Oktober 2024). Polemik Gelar Doktor *Honoris Causa* Raffi Ahmad yang Tak Diakui Pemerintah. *Detik.com*, hlm. 1.
- Puspita, M. D. (19 Agustus 2024). Harta Kekayaan Bahlil yang Kini Jadi Menteri ESDM, Capai Rp310 Miliar. *Tempo*, hlm. 1.
- Putra, S. D. E. (2022). (Pand) Economics: Refleksi atas Sistem Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 5(2), 17-29.
- Putri, K. (25 Oktober 2024). Berjudul Sultan Andara, Raffi Ahmad Diprediksi Akan Jadi Pejabat Paling Tajir di Indonesia. *Tempo*, hlm. 1.
- Rahmayunita, H. (18 Januari 2024). Rajin Ikut Kampanye Capres Prabowo Subianto, Berapa Bayaran Raffi Ahmad? *Suara.com*, hlm. 1.
- Raihan, M., Yakub, A., & Kambo, G. A. (2023). Gelar Akademik dan Citra Politik (Studi Kasus: Strategi Kemenangan Nurdin Abdullah dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018). *Journal Publicuho*, 6(1), 202-207.
- Reed, E., & Johnson, B. (2023). Overview of Cultural Capital Theory's Current Impact

- and Potential Utility in Academic Libraries. *The Journal of Academic Librarianship*, 49(6), 102782.
- Rosser, A. (2023). Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance. *Journal of Contemporary Asia*, 53(1), 53-78.
- Setuningsih, N. (22 Oktober 2024). Tugas Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden. *Kompas*, hlm. 1.
- Sulhan, M., & Lessy, Z. (2022). Otoritas dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial "Otoritas" Max Weber. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 101-112.
- UIPM Buka Suara Usai Beri Gelar Doktor Honoris Causa Ke Raffi Ahmad. (September 2024). *CNN Indonesia*, hlm. 3.
- Wacquant, L. (2013). Symbolic Power and Group-Making: On Pierre Bourdieu's Reframing of Class. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 274-291.
- Wang, Y. (2016). A Review of the Literature Concerning Urban Structure. In *A Century of Change: Beijing's Urban Structure in the 20th Century*. New York: Springer International Publishing.
- Webb, S., Burke, P. J., Nichols, S., Roberts, S., Stahl, G., Threadgold, S., & Wilkinson, J. (2017). Thinking With and Beyond Bourdieu in Widening Higher Education Participation. *Studies in Continuing Education*, 39(2), 138-160.
- Wiegmann, W. L. (2017). Habitus, Symbolic Violence, and Reflexivity: Applying Bourdieu's Theories to Social Work. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 44(4), 95-116.
- Yaniasih. (23 November 2024). Polemik Gelar Doktor Bahlil: Kualitas Publikasi Dikorbankan Demi Lulus Cepat? *The Conversation*, hlm. 2.
- Zhafira, N. N., Nabila, F., Latifah, S. N., Regar, L. H. B., Azzahra, N., & Akmalia, R. (2024). Upaya Menegakkan Budaya Etika Akademik dalam Perguruan Tinggi. *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain*, 1(3), 163-174.